

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJP didefinisikan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 1 ayat 1 sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut pendapat Betham, dkk (2019), PBJP memiliki peranan yang penting dalam mendorong peningkatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. PBJP yang dilakukan diharapkan memenuhi prinsip *value for money*, yaitu memiliki nilai manfaat yang sebesar-sebesarnya dan berkontribusi untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM, serta pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan di bidang keagamaan tidak terlepas dari aktivitas PBJP. Aktivitas tersebut dilakukan untuk menunjang pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu bentuk perwujudan pelayanan prima di Kementerian Agama yaitu

pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) dengan dana yang bersumber dari APBN berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembangunan gedung PLHUT tersebut merupakan inovasi baru Kementerian Agama pada tahun 2019.

PLHUT adalah pusat layanan terpadu untuk meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji dan umroh. Layanan tersebut meliputi layanan informasi, pendaftaran, pembayaran, serta layanan bimbingan manasik haji dan umroh. Sehingga calon jamaah akan mendapatkan pelayanan dalam satu gedung sesuai dengan konsep implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pembangunan PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dilakukan pada tahun 2020. Pembangunan PLHUT dinilai sangat penting dan harus segera direalisasikan mengingat minimnya fasilitas layanan haji dan umroh yang tersedia. Sebelum adanya PLHUT, ruang fasilitas pelayanan haji dan umroh merupakan alih fungsi dari ruang kerja pegawai. Faktor keamanan masyarakat saat melakukan pembayaran di bank juga menjadi faktor penunjang pentingnya pembangunan PLHUT, karena lokasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dan bank mitra cukup jauh.

Pembangunan PLHUT merupakan pengadaan berupa pekerjaan konstruksi sehingga harus dilakukan melalui penyedia dengan metode tender. Adapun peraturan yang harus dipatuhi atas kegiatan pembangunan PLHUT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Terdapat 6 (enam) tahapan pengadaan yang dilakukan melalui penyedia sesuai dengan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Tahapan tersebut yaitu perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serta tahap serah terima pekerjaan. Kegiatan perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun penyedia lebih dijelaskan lagi dalam Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pembangunan PLHUT sangat urgen dan mendesak untuk dilakukan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Meski demikian, proses pembangunan PLHUT harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas kesesuaian tahapan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dengan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Selain itu, penulis juga akan membahas pengenaan pajak atas pengadaan PLHUT tersebut.

Pada karya tulis ini, fokus penulis adalah proses pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “PENGADAAN BARANG DAN JASA GEDUNG PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMROH TERPADU (PLHUT) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam karya tulis ini adalah peninjauan terhadap kesesuaian tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi PLHUT

dengan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan, tahap persiapan yang terdiri dari persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan, tahap pelaksanaan yang terdiri atas pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, serta tahap serah terima hasil pekerjaan. Selain itu, penulis juga membahas jenis perpajakan atas pengadaan pekerjaan konstruksi PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Memahami proses pengadaan pembangunan gedung PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.
2. Memahami pengenaan pajak atas pengadaan PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini terfokus pada proses pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 sesuai LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Adapun proses/tahapan tersebut dimulai dari tahap perencanaan (tahap internal), tahap persiapan (tahap internal) yang meliputi persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan, tahap pelaksanaan yang terdiri atas pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak hingga tahap serah terima hasil pekerjaan. Penulis juga membahas pajak yang dikenakan atas pengadaan PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas.

Pada saat karya tulis ini disusun, sudah terbit peraturan terbaru tentang PBJP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, begitu juga dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Namun, objek penulisan karya tulis ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas yang melakukan kegiatan PBJP pada tahun 2020. Sehingga peraturan yang dijadikan acuan pada karya tulis ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan membawa manfaat, yaitu:

1. Menambah pengetahuan penulis terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah kategori pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penyedia yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 serta perpajakan atas pengadaan pekerjaan konstruksi.
2. Memberikan tambahan informasi/kajian bagi instansi yang dijadikan objek dalam karya tulis tugas akhir ini.
3. Menjadi bahan literasi bagi masyarakat umum mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang telah disusun oleh penulis. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori dan kebijakan yang terkait dengan PBJP yang digunakan sebagai dasar dalam menguraikan pembahasan karya tulis. Teori dan kebijakan yang disampaikan ada tiga, yang pertama yaitu konsep dasar PBJP yang terdiri atas pengertian pengadaan barang/jasa, dasar hukum pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan barang/jasa, dan cara pengadaan barang/jasa. Yang kedua yaitu konsep dasar pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang menjelaskan tentang proses pengadaan melalui penyedia dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Teori ketiga yaitu kewajiban perpajakan di bidang PBJP.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan profil singkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas mulai dari visi misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Pada bab ini juga diuraikan penjelasan atas rumusan masalah yang terdapat pada karya tulis tugas akhir ini. Penjelasan tersebut meliputi seluruh proses pengadaan

pekerjaan konstruksi belanja modal gedung dan bangunan PLHUT pada satuan kerja objek karya tulis tugas akhir, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan serta kewajiban perpajakan atas pengadaan PLHUT.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 3 (tiga) metode dan pembahasan. Selain itu, penulis juga menyampaikan beberapa saran atas kegiatan pengadaan tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat untuk ke depannya.